

PUDARNYA SPIRIT *AL-MĀ'UN*

Oleh: Muhsin Hariyanto

QS *al-Mā'un* (QS 107: 1-7) mengisyaratkan sebuah peringatan keras dari Allah SWT terhadap muslim yang – meskipun – telah melaksanakan shalat, tetapi karena ketidakpeduliannya terhadap (nasib) anak yatim dan orang miskin dikategorikan oleh-Nya sebagai “pendusta” agama. Sebuah kategori yang sangat buruk bagi siapa pun yang mendambakan (perolehan) rahmat Allah dan perlindungan terhadap azab-Nya. Kenapa para pelaku shalat itu mendapatkan kategori buruk seperti itu? Kata kunci adalah: “kelalaiannya” dalam menyempurnakan penegakan shalatnya, dikarenakan (masih) adanya sikap *riya'* di dalam diri para pengamal shalat. Sehingga, meskipun secara ritual yang bersangkutan telah (merasa) melaksanakan shalat, tetapi nilai instrumental dan fungsionalnya tidak atau (minimal) belum terwujud dalam kehidupan nyata. Mereka masih menjadi manusia-manusia yang dikendalikan oleh *egonya*, dan menjadi orang yang tidak atau (minimal) belum memiliki kepedulian yang signifikan bagi setiap anak yatim dan orang miskin. Sehingga hak-hak asasi mereka tidak terpenuhi oleh sejumlah kewajiban yang semestinya ditunaikan oleh setiap muslim yang telah menegakkan shalatnya. Mereka menjadi terlantar oleh karena penelantaran para pelaksana shalat yang (sesungguhnya) belum pernah menegakkannya dengan benar. Shalat hanya sekadar menjadi tindakan ritual dan kehilangan nilai-nilai instrumental dan fungsionalnya.

Dalam kaitannya dengan bahaya (sikap) *riya'*, *Rasulullah s.a.w.* pernah mengingatkan kepada para sahabatnya: “*Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atasmu (para sahabatku) adalah syirik kecil. (Atas pernyataan Rasulullah s.a.w. itu pun) para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah s.a.w., apa yang engkau maksud dengan syirik kecil itu? Rasulullah s.a.w. pun menjawab: “ ar-Riya' . (Hadis Riwayat Ahmad dari Mahmud bin Labid)*

Banyak orang yang mau peduli kepada sesama karena berharap adanya umpan-balik. Sedang pada setiap kepedulian yang tak memiliki umpan-balik, atau umpan-baliknya tak sepadan dengan tingkat kepeduliannya, pada umumnya orang memiliki keengganan untuk melakukannya. Hingga kepedulian orang terhadap orang lain, hingga kini, selalu diukur dengan sejauhmana dia akan memperoleh sesuatu dari apa yang pernah diberikan kepada siapa pun.

Dalam konteks aktivitas sosio-ekonomi, kepedulian sosial itu pun masih terbatas pada wacana *CSR (Corporate Social Responsibility)*, yang ujung-ujungnya adalah pemberian dana kepada siapa pun yang pantas dipedulikan untuk kepentingan “*image-building*” (pencitraan-baik) para pemberinya. Sangat jarang dana CSR tersebar kepada mereka yang seharusnya berhak mendapatkannya bukan karena kepentingan “*image-building*” perusahaan-perusahaan yang memberinya. Faktor penyebabnya mudah ditebak dengan sebuah pertanyaan penting: “*untuk apa kami memberi, kalau pada akhirnya tidak memperoleh apa-apa dari pemberian kami?*”

Cukup menarik apa yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi, utamanya komunitas ekonom muslim, dalam rangka menggugah kesadaran untuk memberi, memunculkan sebuah istilah populer: “*pareto optimum*”. Apa maksudnya? Dr. Andi Irawan menulisnya dalam rubrik “Opini”, *Republika*, Selasa, 23 Maret 2010. *Pareto optimum* – menurutnya — adalah suatu kondisi saat introduksi kebijakan tersebut menyebabkan ada pihak yang diuntungkan (*better-off*), tanpa menyebabkan satu pihak pun yang dirugikan (*worse-off*). Dinyatakan bahwa pada umumnya kebijakan ekonomi terkategori sebagai *second best policy*, yang bermakna kebijakan ekonomi jarang dan sukar sekali untuk memenuhi kategori *pareto optimum*. Umumnya suatu implementasi kebijakan ekonomi akan berakibat ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Walaupun demikian, kalau kita berusaha menghadirkan *pareto optimum* secara total, maka suatu kebijakan yang berstatus *second best policy* sekalipun, bisa ditujukan untuk menciptakan suatu kondisi *pareto optimum*. Kaedah implementasinya sederhana saja, pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut diberikan kompensasi dari kerugian yang dideritanya atau diproteksi dari imbas negatif kebijakan tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa di dunia modern sekarang ini gagasan *pareto optimum* akan sulit untuk dilaksanakan, karena “manusia modern” tengah berhadapan dengan sistem dan budaya (baca: perilaku) yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral yang seharusnya mereka jadikan sebagai acuan dalam berperilaku. Dan ironisnya, umat – sebagai pelaku — selalu menjadi sasaran tudingan. Mereka menjadi dianggak tidak – atau minimal kurang — bermoral karena kesalahan mereka sendiri, tanpa memberi peluang kepada umat untuk berwacana tentang “sebab-musabab”, kenapa mereka seolah-olah begitu menikmati perilaku mereka tanpa merasa bersalah. Pertanyaan besarnya, jangan-jangan mereka menjadi sebegitu menikmati perilaku mereka karena kelemahan para pemimpinnya yang selama ini mempertontonkan “*akhlak madzmumah*” kepada umatnya, dan akhirnya menjadi “model” bagi umatnya, dan sebegitu ‘pelit’ dalam memberi contoh “*akhlak mahmudah*” kepada umat. Sehingga, untuk menerapkannya diperlukan: “kesadaran untuk berbagi, tanpa harus merasa kehilangan sesuatu ketika memberi”.

Gagasan *pareto optimum* ini, bila kita simak dengan seksama, semangatnya sama sebangun dengan perintah berinfaq, bersedekah dan berzakat serta paralel dengan semangat larangan “*riba*” dalam al-Quran dan as-sunnah. Memberi adalah sesuatu yang akan terbalas dengan pengembalian yang – secara kuantitatif dan kualitatif – lebih bernilai. Dan inilah jaminan oleh Allah yang dinyatakan dalam al-Quran. Rasulullah s.a.w. pun menjelaskan dalam sunnahnya dengan berbagai pernyataan dan bukti empiris. Hanya saja, karena buta dan sakitnya hati manusia, seseorang atau sekelompok orang tidak bisa melihat dengan mata-hatinya. Dan oleh karenanya, diperlukan kebersihan hati untuk memahami “*nalar-pareto optimum*” (perintah infaq, sedekah dan zakat dan larangan “*riba*”)

Ironisnya, para pemimpin kita dan orang-orang yang oleh al-Quran disebut sebagai “*mutrafûn*” (kelompok-elit sosial di tengah peradaban umat), ditengarai, telah dan tengah mengajari diri kita untuk terbiasa memandang sesama (manusia) dengan cara-pandang “subjek-objek”, yang akibatnya sering membuat kita lupa untuk memahami

nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kata banyak pakar kepemimpinan, perilaku masyarakat kita (baca: umat) adalah potret perilaku pemimpinnya. Perilaku pemimpin – pada umumnya — menjadi model bagi umat kita. Sehingga kalau pemimpinnya kurang memahami etika kepemimpinannya, tidak berperilaku berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, abai terhadap kesusahan yang diderita sesama, lebih mementingkan diri, sering menampilkan perilaku memeras (misalnya: sering memaksakan kehendak pada umatnya untuk menjadi gerbong mereka tanpa dialog yang jujur dan terbuka), serba tertutup dan – apalagi – mendasari perilakunya dengan sikap otoriter, apa yang bisa diharap dari perilaku umatnya? Tentu saja umat akan menjadi korban ‘keserakahan’ para pemimpinnya. Oleh karena itu, jika kita berkehendak untuk mendidik umat dengan nilai-nilai Islam, mau tidak mau pemimpin kita harus memberi contoh terlebih dahulu bagaimana seharusnya menjadi “manusia-muslim”. Berikan contoh perilaku Islami hingga umat menjadi tergerak untuk mencontohnya. Pemimpin adalah model bagi umatnya. Atau dengan kata lain, para pemimpin harus merekonstruksi moralitas mereka sendiri, sebelum berharap terjadinya rekonstruksi moralitas umat.

Dalam kaitannya dengan pudarnya spirit *al-Ma’un*, di negeri kita tercinta saat ini, ada satu hal dari sekian persoalan moralitas yang kurang diperhatikan dan banyak diabaikan, yaitu “kesetiakawanan sosial”. Kesetiakawanan sosial, sebagai yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam beberapa hadisnya, merupakan persoalan akhlak sosial yang – hingga kini — kurang tergarap. Moralitas luhur ini bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa tumbuh dan berkembang pada diri manusia, karena di dalamnya ada unsur “pengurbanan” yang harus diberikan. Orang, pada umumnya, lebih senang untuk meminta daripada memberi. Padahal kesetiakawan mempersyaratkan kesediaan untuk banyak memberi, yang berarti seseorang harus memiliki kerelaan untuk mengambil sebagian yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain dengan semangat keikhlasan. Kesetiakawanan sosial bukanlah merupakan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, *taken for granted*. Ia tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Ia tidak akan pernah tumbuh dan berkembang tanpa proses pendidikan dan pelatihan yang tertata? Dan oleh karenanya harus ada orang dan lembaga yang kompeten dan bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkannya lengkap dengan perencanaan yang matang untuk diimplementasikan dalam program pendidikan dan pelatihan terpadu.

Sebagai sebuah upaya, ketika penulis mengajar di kelas “program studi Ilmu-Ekonomi UM Yogyakarta untuk matakuliah Agama Islam”, penulis pernah menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh keuntungan. Antara lain dengan pola *bai’ al-’inah*” (jual-beli *’inah*). Yaitu: “seseorang (penjual) menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga (pembayaran) yang ditangguhkan, kemudian orang-orang yang membeli itu menjual lagi (barang yang baru dibelinya itu) kepada penjualnya dengan harga tunai, (tetapi) dengan harga lebih rendah daripada harga pembeliannya semula. Kiat ini dipakai dalam rangka untuk meniyasati jebakan “*riba*” yang – secara legal-formal – diharamkan dalam al-Quran maupun as-Sunnah”, sehingga seolah-olah orang yang bertransaksi jual-beli itu – dengan pola *’inah* itu — (telah) terlepas sama sekali dari tindakan “*riba*”.

Penulis katakan kepada para mahasiswa, bahwa pola jual-beli *'inah* itu esensinya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan di atas kezaliman. Kenapa kini kita – umat Islam — masih terjebak dalam semangat ribawi seperti itu dengan berbagai dalih karena hasutan rasa enggan untuk “memberi”, sementara al-Quran dan as-Sunnah mengajarkan kepada kita untuk siap berbagi? Alangkah indahnya jika semangat memberi dan berbagi itu kita hidupkan kembali, dengan etos sedekah dan kehati-hatian kita untuk tidak terjebak pada kubangan semangat “*ribawi*”. Bersedekahlah dengan semangat *pareto optimum*, *etos al-Mâ'un* yang memberdayakan, hingga keberislaman kita bisa terwujud menjadi “rahmat” bagi semuanya.

Ibda' bi nafsik (mulailah dari diri sendiri). Kita hidupkan kembali spirit *al-Mâ'un* yang kini tengah redup, berbekal semangat “Mentari Muhammadiyah” yang boleh jadi ‘bisa’ redup – bila tak terkawal oleh keimanan yang kokoh — di tengah badai kehidupan yang lebih banyak menawarkan kemewahan duniawi.

Penulis adalah Dosen Tetap FAI-UM Yogyakarta dan Dosen Luar Biasa STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta

(Sumber: Suara Muhammadiyah)